

HIMPUNAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT PERTANAHAN



**DR.ASLAN NOOR, SH.,MH.,CN
LILIS RATNANINGSIH,.SH.,MH**

**HIMPUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
PERTANAHAN**

Copyright © 2018 Dr.Aslan Noor, SH.,MH.,CN dan
Lilis Ratnaningsih, SH.,MH

Penulis: Dr.Aslan Noor, SH.,MH.,CN dan
Lilis Ratnaningsih, SH.,MH
Penata Letak: Tim Penerbit
Desain sampul: Tim Penerbit

Diterbitkan oleh:
Aria Mandiri Group
Bandung – Jawa Barat
089657405447

Cetakan Pertama, Oktober 2018
i + 851 Hlm, 14 cm x 21 cm
ISBN: 978-602-6616-51-7
Hak cipta dilindungi undang-undang.
All Right Reserved

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala karena atas rahmat dan karunia Nya, penulis dapat menyelesaikan menyusun Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Pertanahan, yang merupakan hasil penelitian yang didanai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti RI dalam skim Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi dalam waktu 3 (tiga) tahun, dengan mengambil judul: Konsep Kepemilikan Atas Tanah Dan Ruang Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia

Buku ini merupakan salah satu keluaran dari hasil penelitian, selain artikel-artikel yang terbit dalam jurnal internasional maupun jurnal nasional yang terakreditasi. Diseminasi hasil penelitian dilaksanakan pada International Conference seperti International Asian Academic Conference dan pada *Conference of the International Journal of Arts and Sciences*, (IJAS conference - USA) dan International Conference ADRI

yang diselenggarakan di Universitas Zaenal Abadin di Terengganu- Malaysia.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menemukan konsep kepemilikan atas tanah dan ruang bagi bangsa Indonesia berlandaskan ajaran hak asasi manusia, termasuk konsep hak penggunaan /pengelolaan /kepemilikan ruang atas dan bawah tanah dalam mengantisipasi pembangunan ruang atas seperti perumahan vertikal, basement, MRT dan lain-lain. Obyek penelitian selanjutnya yaitu kepemilikan ruang di atas perairan yang akan mengkaji sistem Marine Cadastral yang merupakan satu kesatuan teknis dengan daratan. Obyek Penelitian lainnya adalah menghimpun dan menganalisis dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian menemukan konsep penyelesaian sengketa pertanahan, suatu kenyataan bahwa hampir 80 % permasalahan hukum keperdataan di pengadilan berkaitan dengan tanah.

Buku ini menyajikan informasi sekaligus sebagai sarana penelitian yang berkaitan dengan kajian pertanahan dan untuk memudahkan masyarakat umum maupun kaum akademisi mempelajari dan memahami

berbagai Peraturan Perundang-undangan dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga, semoga segala kebbaikannya tercatat sebagai amal dan mendapat pahala dari Allah Subhanahuwata'ala. Amin YRA. Kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti RI yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dalam skim Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi. Kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, yang telah memfasilitasi penelitian, sehingga penelitian dapat berlagsung dan sesuai dengan tenggang waktu yang telah direncanakan. Kepada Rektor Universitas Islam Nusantara. Kepada Ketua LPPM Universitas Islam Nusantara beserta segenap civitas akademika Program Studi Magister Ilmu Hukum PPs Universitas Islam Nusantara, yang telah begitu banyak memberi bantuan dan dorongannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, Kementerian Hukum

dan HAM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan yang telah banyak membantu memfasilitasi penelitian kepustakaan, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan data maupun informasi yang sangat bermanfaat.

Terima kasih kepada penerbit Aria Mandiri Group, yang sudah bersedia menerbitkan buku ini, buku ini merupakan sumbangan tersendiri yang sangat berarti bagi penulis. Di atas segala terima kasih, kepada Allah SWT jualah segalanya di kembalikan. Ya Allah, jadikanlah karya ini berkah dan bermanfaat baik bagi penulis maupun khalayak pembaca. Mudah-mudahan buku ini dapat menjadi setitik air di lautan samudera ilmu pengetahuan dan mengisi khasanah ilmu hukum.

Bandung, Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

I	Kata Pengantar	ii
II	Daftar Isi	iv
III	Peraturan Perundang-undangan	
A.	Undang-Undang	
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999	Kehutanan 1
2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang 97
3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014	Konservasi Tanah Dan Air 106

B.	Peraturan Pemerintah		
1.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999	Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi	184
2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004	Perencanaan Kehutanan	228
3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004	Perlindungan Hutan	276
4.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007	Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan	340
5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan	479

6.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan	540
7.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010	Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan	548
8.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010	Penggunaan Kawasan Hutan	592
9.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan	615
10.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010	624

Tentang Penggunaan
Kawasan Hutan

C. Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.18/Menhut-II/2011 Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan 636
2. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 19 /Menhut-II/2011 Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan 692
3. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 44 /Menhut-II/2012 Pengukuhan Kawasan Hutan 718
4. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62 /Menhut-II/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan 770
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.51 /Menlhk/Setjen/Kum.1/6 /2016 Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi 791

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.81 /Menlhk/Setjen/Kum.1/1 0/2016 Kerjasama Penggunaan Dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan 817

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.93 /Menlhk/Setjen/Kum.1/1 2/2016 Panitia Tata Batas Kawasan Hutan 833

D. Keputusan Menteri

1. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.323 /Menhut-II/2011 Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan Dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Areal Penggunaan Lain 847



Penerbit Aria Mandiri Group
Jl. Babakan Priangan No. 26 Bandung
Email: ariamandiri.publisher@gmail.com

ISBN 978-602-6616-51-7

